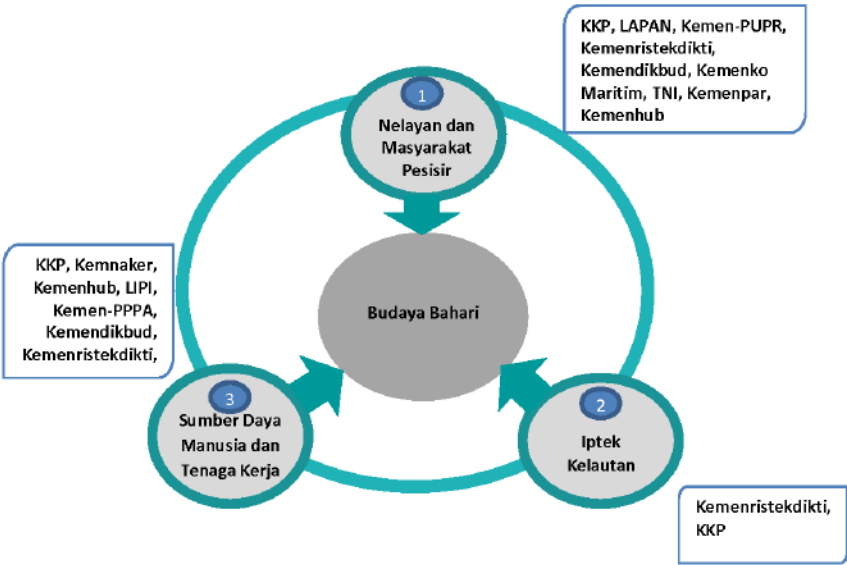


PROGRAM PRIORITAS E
BUDAYA BAHARI

PROGRAM PRIORITAS E
BUDAYA BAHARI

Program prioritas budaya bahari terdiri dari 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Nelayan dan Masyarakat Pesisir; (2) Iptek Kelautan; dan (3) Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja. Secara skematik, 3 (tiga) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

1. Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Nelayan merupakan pelaku penting dalam sektor perikanan. Jumlah Rumah Tangga Nelayan berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 sebanyak 864.485 Rumah Tangga atau mengalami penurunan sebanyak hampir 50% dalam kurun waktu 10 tahun. Total tenaga kerja di sektor perikanan berjumlah sekitar 13 juta orang, sebanyak 51% beraktivitas di produksi (perikanan tangkap dan budi daya), 38% di pemasaran dan hanya 11% di sektor pengolahan. Dengan demikian, komponen hulu (produksi) menjadi tumpuan dalam aktivitas mata pencaharian. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah tekanan terhadap lingkungan pesisir. Terdapat 12.827 desa pesisir (17%) yang langsung berbatasan dengan laut dan sampai

dengan tahun 2012 sebanyak 7,9 juta penduduk pesisir hidup masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka ketimpangan penghasilan rumah tangga nelayan/ masyarakat pesisir cukup tinggi, diperkirakan dengan Indeks Gini sebesar 0,54 (Bappenas, 2015). Hal ini karena minimnya ketersediaan pelayanan dasar pada wilayah pesisir yang sulit dijangkau.

Persoalan yang sering muncul terkait nelayan antara lain keterbatasan keterampilan dan penguasaan teknologi, rendahnya akses terhadap modal produktif, rantai niaga yang merugikan, rendahnya penguasaan manajemen usaha, dan tidak adanya perlindungan sosial. Kondisi kemiskinan yang terus melekat pada nelayan menyebabkan terjadinya penurunan preferensi terhadap profesi nelayan. Untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan, diperlukan penguatan daya saing industri (sektor pengolahan) sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah produk, insentif program hilirisasi, serta skema pembiayaan yang berpihak pada nelayan dan pembudi daya. Nelayan dapat menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan perikanan (*co-management*), namun perlu didukung dengan penguatan kelembagaan nelayan (kelompok dan koperasi), pendampingan melalui penyuluh perikanan, serta pendidikan formal dan informal.

2. Iptek Kelautan

Iptek kelautan merupakan salah satu wahana yang harus dikuasai agar pendayagunaan potensi kelautan optimal. Inovasi teknologi kelautan merupakan keharusan untuk menjawab tantangan di dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara efektif dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya laut membutuhkan teknik yang semakin efisien, peralatan yang semakin maju, dan sumber daya manusia yang semakin terlatih. Penguasaan iptek erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang nantinya berperan sebagai pelaku utama inovasi dan juga sekaligus tenaga utama yang akan menggerakkan sektor kelautan.

Selain itu, perlu memberikan pembinaan sejak dini kepada generasi muda mengenai kelautan agar terpacu untuk mencintai laut dan lebih mudah mendalami ilmu kelautan. Untuk itu, kurikulum pendidikan kelautan perlu dimasukkan agar dapat memacu peningkatan iptek kelautan. Pemerintah perlu membangun dan memperluas lembaga penelitian dan perguruan tinggi di bidang kelautan. Di sisi lain, para

peneliti kelautan perlu didorong untuk menghasilkan inovasi baru yang penting bagi kemajuan bidang kelautan. Aktivitas riset yang diindikasikan melalui publikasi hasil riset terkait sumber daya kelautan masih sangat terbatas. Peneliti Indonesia maupun peneliti asing yang melakukan kegiatan riset terkait sumber daya kelautan Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah riset yang dilakukan di wilayah daratan. Saat ini riset kelautan masih belum terintegrasi dalam konsep pembangunan Riset Nasional. Selain itu, jejaring riset kelautan nasional yang melibatkan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku riset lainnya masih belum terbangun dengan baik. Begitu pula dengan infrastruktur pendukung riset dan survey kelautan, yang ketersediaannya masih rendah. Agenda kegiatan penelitian yang menggunakan kapal riset belum terpadu. Saat ini Indonesia baru memiliki 12 unit kapal riset yang tersebar di lima institusi.

3. Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2020-2030, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, di mana penduduk dengan umur produktif sangat besar, sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mendekati 70%. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif akan mencapai sekitar 180 juta jiwa, sementara usia nonproduktif hanya 60 juta jiwa (BKKBN, 2013). Untuk itu perlu ditekankan supaya melimpahnya jumlah penduduk usia produktif bisa memberikan keuntungan optimal bagi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi kelautan dan kemaritiman supaya menjadi lebih produktif dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Melimpahnya penduduk usia produktif yang tinggi akan berdampak positif apabila diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, saat ini mayoritas nelayan dan pembudi daya ikan Indonesia berpendidikan sekolah dasar, sehingga memerlukan berbagai program pendidikan dan pemberdayaan diantaranya melalui pendampingan yang intensif dari penyuluh perikanan terkait peningkatan keterampilan maupun diseminasi teknologi yang efisien dan efektif. Selanjutnya, masih dibutuhkan jumlah tenaga kerja kepelautan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, yang semakin meningkat, termasuk kebutuhan sumber daya manusia kepelabuhanan untuk pelabuhan umum, pelabuhan khusus, dan

pelabuhan perikanan. Permasalahan lainnya terkait sumber daya manusia adalah masih terbatasnya sertifikasi kompetensi bagi anak buah kapal dan nahkoda.

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas budaya bahari, dapat dilihat pada matriks berikut:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019
PROGRAM PRIORITAS E. BUDAYA BAHARI

Sasaran Utama:
1. Meningkatnya wawasan bahari dan kesejahteraan nelayan
2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan hasil inovasi dan difusi iptek kelautan di industri

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
E.1 NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR											
1.	Penguatan Sistem Data dan Informasi Kelautan, Inventarisasi, dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan	Pengelolaan data statistik dan informasi kelautan perikanan	Terwujudnya pengembangan satu data kelautan dan perikanan	Satu data ke-lautan dan perikanan	1	1	1	1	KKP	kelautan dan perikanan	APBN
			Pengelolaan kelayakan: pembangunan sistem informasi nelayan di sentra nelayan	20 sentra nelayan	20	20	20	20	KKP		APBN
			Investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan: pembangunan sistem informasi pemasaran hasil per-	1 buah	1	1	1	1	KKP		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			ikanan								
		Pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh	Layanan penguna bidang pemanfaatan penginderaan jauh	Operasionalisasi sistem otomatisasi zona potensi penangkapan	v	v	v	v	LAPAN	KKP, BPPT	APBN
		Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa, dan tambak	Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi/ditingkatkan	524 km jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi/ditingkatkan	252 km	91 km	99 km	82 km	Kemen-PUPR	KKP, Pemda	APBN, APBD
2.	Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Dibutuhkan dalam Pengembangan Usaha bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Kawasan perikanan budi daya	Peningkatan produksi perikanan budi daya untuk komoditas air payau dan laut dengan pengadaaan Keramba Jaring Apung (KJA)	1.150 unit KJA	250	275	300	325	KKP	Kemen-PUPR	APBN
			Revitalisasi tambak	20 kawasan (kumulatif)	-	10	15	20	KKP	Kemen-PUPR	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pembinaan dan pengembangan air minum	Pembangunan SPAM di kawasan khusus	Pembangunan SPAM di 9 kawasan nelayan	4 kawasan nelayan	1 kawasan nelayan	2 kawasan nelayan	2 kawasan nelayan	Kemen-PUPR	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman	Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Peningkatan kualitas kawasan di 121 permukiman agro/minapolitan	32 kawasan	36 kawasan	28 kawasan	25 kawasan	Kemen-PUPR	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Penyediaan rumah khusus dan pembinaan rumah negara	Pembangunan rumah khusus	4.974 unit rumah khusus nelayan yang terbangun	1.626 unit	3.348 unit	-	-	Kemen-PUPR	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan keamanan pantai	<i>Breakwater</i> yang dibangun/ditingkatkan	230,6 km bangunan pemecah gelombang (<i>breakwater</i>) di kawasan nelayan	38 km	18,6 km	94 km	80 km	Kemen-PUPR	BPPT, Pemda	APBN, APBD
		Pembangunan rumah swadaya nelayan	Rumah nelayan meningkat kualitasnya	1.800 unit rumah yang diperbaiki	253 unit	400 unit	600 unit	547 unit	Kemen-PUPR dan KKP	Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
3.	Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan sertifikasi awak kapal perikanan	Awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan	5.800 awak kapal (kumulatif)	2.299	3.400	4.600	5.800	KKP	Kemnaker, Kemenhub	APBN
		Pengelolaan kenelayanan	Nelayan memiliki tanah yang bersertifikat	70.000 bidang tanah	20.000	20.000	15.000	15.000	KKP	Kemen-ATR, Pemda	APBN, APBD
			Kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya	2.200 lembaga usaha (kumulatif)	2.050	2.100	2.150	2.200	KKP	Pemda	APBN, APBD
		Produksi dan usaha pembudidayaan ikan	Fasilitasi peningkatan kelembagaan pembudi daya ikan	1.000 lembaga (kumulatif)	700	800	900	1.000	KKP		APBN
4.	Penyediaan Kemudahan Akses terhadap Ilmu	Program penyediaan akses iptek, lahan, dan	Jumlah penelitian di bidang perikanan	130 penelitian di bidang perikanan (kumulatif)	113	120	125	130	Kemenristek-dikti	KKP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Pengetahuan, Teknologi Informasi, Lahan, dan Pembiayaan untuk Kepentingan Pengembangan Usaha bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	pembiayaan bagi pengembangan usaha nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Jumlah teknologi yang dikembangkan	40 teknologi yang dikembangkan (kumulatif)	30	32	35	40	Kemenristek-dikti	KKP	APBN
5.	Peningkatan Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat Kelautan yang Diwujudkan melalui Semua Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan	Pendidikan kelautan dan perikanan	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	28.250 orang peserta pendidikan kelautan dan perikanan	6.725 unit	6.950 unit	7.250 unit	7.325 unit	KKP	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kemenristek-dikti	APBN
6.	Membangkitkan Pemanahan Wawasan dan Budaya Bahari	Penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan	Penyisipan materi muatan lokal bahari (pengenalan lingkungan laut, penge-	Meningkatnya pengetahuan tentang budaya bahari pada level Pendidikan Anak	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kemendikbud	KKP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			nalan aktivitas budaya bahari) pada kurikulum, sistem pembelajaran, dan buku untuk semua tingkat pendidikan mulai dari usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan nonformal, dan informal	Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, menengah, nonformal, dan informal							
		Pelatihan kelautan dan perikanan	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	170.000 orang kelautan dan perikanan yang dilatih	35.000 orang	40.000 orang	45.000 orang	50.000 orang	KKP	Kemnaker, Pemda	APBN, APBD
		Koordinasi budaya, seni, dan olahraga bahari	Terciptanya kreativitas dan sinergi penyelenggaraan budaya/olahraga bahari yang mendorong penguatan karakter bahari	Acara budaya/olahraga bahari yang dikoordinasikan/diselenggarakan	-	5	5	8	Kemenko Maritim	Kemenpar, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pengembang-an destinasi wisata budaya	Meningkatnya kualitas desti-nasi wisata bu-daya	Jumlah desti-nasi wisata budaya yang dikembang-kan dan mem-perkuat nilai sejarah dae-rahnya	10	10	10	10	Kemenpar	Kemendik-bud, Pemda	APBN, APBD
		Penyeleng-garaan pem-berdayaan wilayah per-tahanan laut	Meningkatnya pemberdayaan dan pembina-an wilayah pertahanan negara matra laut	Jumlah kegiatan pembinaan potensi maritim	2	2	2	2	TNI		APBN
				Jumlah pem-bangunan fasilitas dan pengadaan peralatan potensi mari-tim (paket)	4	4	4	4	TNI		APBN
7.	Identifikasi dan Inven-tarisasi Nilai Budaya dan Sistem Sosi-al Kelautan di Wilayah NKRI sebagai Bagian dari Sistem Ke-budayaan	Pengelolaan warisan dan diplomasi budaya	Terpeliharanya warisan buda-ya	Perahu pinisi dari Sulawesi Selatan	v	v	v	v	Kemendik-bud	KKP, Kemenhub	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Nasional										
8.	Harmonisasi dan Pengem-bangan Un-sur Kearifan Lokal ke da-lam Sistem Pengelolaan dan Peman-faan Sumber Daya Kelautan yang Lestari	Pendayagu-naan pulau-pulau kecil	Terevitalisasi-nya masyara-kat hukum adat, tradisio-nal, dan lokal di pulau-pulau kecil (komuni-tas)	15 komunitas	5	3	2	5	KKP	Kemendik-bud, Pemda	APBN, APBD
		Pengembang-an produk inovasi yang mendukung pengembang-an industri strategis perikanan	Inovasi peran-cangan dan komponen kapal angkut ikan	8 desain kapal angkut dan 6 komponennya (untuk ikan segar dan ikan beku)	8 desain	2 komponen	2 komponen	2 komponen	Kemen-ristekdikti	KKP, BUMN	APBN, BUMN
			Inovasi penang-kapan ikan	1 alat untuk mengumpul-kan ikan pada alat tangkap ikan (Ledikan)	1	-	-	-	Kemen-ristekdikti	KKP	APBN
			Inovasi tekno-logi pengolah-an perikanan	6 inovasi teknologi pengolah-an perikanan	-	2	2	2	Kemen-ristekdikti	KKP	APBN
9.	Memperta-hankan, Mengem-bangkan, dan Meningkat-	Pengembang-an sejarah	Penulisan buku atlas pelabuhan bersejarah di Indonesia	1 dokumen	1	1	1	1	Kemendikbud		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	kan Peran Kota Pelabuhan Bersejarah										
E.2 IPTEK KELAUTAN											
1.	Peningkatan dan Penguatan Peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Pengembangan Sistem Informasi Kelautan	Peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pengembangan industri perikanan	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menerima beasiswa	150 dosen dan tenaga kependidikan yang menerima beasiswa	20	30	50	50	Kemen-ristekdikti	Kemenkeu	APBN
		Pengelolaan pelabuhan perikanan	Pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan ke-terpaduan	165 pelabuhan perikanan (kumulatif)	120	135	150	165	KKP	Pemda	APBN, APBD
		Penelitian dan pengembangan iptek sumber daya laut dan pesisir	Berkembang-nya inovasi teknologi ke-lautan	30 inovasi teknologi kelautan (kumulatif)	15	20	25	30	KKP	Kemenristekdikti, BPPT, LIPI	APBN
2.	Peningkatan Kolaborasi Riset Kelaut-	Pengembang-an taman sains dan	Science Techno Park (STP) Jepara di bi-	90% STP Jepara menuju	20%	50%	70%	90%	Kemen-ristekdikti	Kemenko Maritim, KKP, BPPT,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	an dan Pengembangan Pusat Keunggulan Kelautan	teknologi dan lembaga pe-nunjang lainnya	dang kelautan dan perikanan yang <i>mature</i>	<i>mature</i>						LPI	
3.	Peningkatan Tata Kelola Iptek, Pengembangan Sarana dan Prasara-na Ilmu Pengetahuan dan Tekno-logi Kelaut-an, dan Agenda Riset Kelautan Strategis	Pengembang-an sarana dan prasara-na pendidik-an tinggi	Jumlah sar-pras perguruan tinggi yang direvitalisasi	15 sarpras perguruan tinggi	3	4	4	4	Kemen-ristekdikti	Kemenperin, KKP, LPI	APBN
E.3 SUMBER DAYA MANUSIA DAN TENAGA KERJA											
1.	Peningkatan Jasa di Bidang Kelautan yang Diimbangi dengan Ketersediaan Lapangan Kerja	Penetapan standar kompetensi kerja	Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi	175 program di tahun 2019 (kumulatif)	100 program	125 program	150 program	175 program	Kemnaker	Kemendag, Kemenperin, KKP, BNSP, Pemda	APBN, APBD
		Jumlah lokasi identifikasi persediaan dan permin-taan tenaga kerja di ka-	Tersedianya data persedia-an dan per-min-taan per sektor sesuai dengan potensi	23 lokasi	23 lokasi	23 lokasi	23 lokasi	23 lokasi	Kemnaker	BPS, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		bupaten/kota	daerah								
		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan wirausaha	50.000 orang pada tahun 2019 (kumulatif)	26.000 orang	31.000 orang	39.000 orang	50.000 orang	Kemnaker	Pemda	APBN, APBD
		Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan	Kawasan yang dibangun atau dikembangkan sarana pra-sarana (sarpras) untuk wisata bahari	12 kawasan	3	3	3	3	KKP	Kemenpar, Kemenhub, Kemen-PUPR, Pemda	APBN, APBD
2.	Pengembang-an Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan	Pengembang-an sumber daya manu-sia laut	Pusat pengem-bangan sumber daya manusia perhubungan laut	Lulusan Pelati-han sumber daya manusia Perhubungan Laut	1.050 orang	600 orang	630 orang	480 orang	Kemenhub		APBN
			Lulusan Dik-lat Pengem-bangan dan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia Perhubungan		10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	Kemenhub		APBN
		Balai Besar Pendidikan Penyebaran	Lulusan Pendidikan Penjenjangan		5.310	5.370	6.480	6.990	Kemenhub		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			dan Pening- katan Ilmu Pelayaran (BP- 3-IP)	sumber daya manusia Perhubungan Laut (orang)							
				Lulusan Pendidikan Penyegaran (<i>Refreshing</i>) sumber daya manusia Perhubungan Laut (orang)	4.200	2.100	900	600	Kemenhub		APBN
				Lulusan Pela- tihan sumber daya manusia Perhubungan Laut (orang)	10.332	11.786	11.270	11.257	Kemenhub		APBN
				Lulusan Diklat Pengembang- an dan Pening- katan sumber daya manusia Perhubungan (orang)	150	150	150	150	Kemenhub		APBN
				Balai pendidik- an dan pela- tihan trans- portasi laut	1.350	1.350	1.350	1.350	Kemenhub		APBN
		Mendorong pemenuhan	Meningkatnya standar kom-	Ratifikasi	-	-	1 Konven-	-	Kemenhub	Kemenko Maritim,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		ketentuan peraturan internasional dengan mera-tifikasi kon-vensi inter-nasional yang terkait dengan standar kom-petensi sumber daya manusia di bidang Kepelautan, antara lain <i>Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Fishing Vessel Personnel</i> (STCW-F)	petensi sumber daya manusia di bidang kepelautan	STCW-F			si STCW-F			Kemenlu, KKP, Kemen-setneg, Setkab	
		Penanganan pelanggaran bidang ke-lautan dan perikanan	Penyidik Pega-wai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan/ Aparat Pene-gak Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	Jumlah PPNS	60	60	60	60	KKP	Polri	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			kemampuan teknisnya								
		Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Polsus PWP-3-K) yang kompeten	Jumlah Polsus PWP-3-K	100	100	100	100	KKP		APBN
			Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP	Jumlah Pokmaswas	1.639	1.655	1.671	1.687	KKP		APBN
		<i>Regional Training and Research Centre (RTRC) on marine biodiversity and eco-system health</i>	Terlaksananya pelatihan ber-basis kompe-tensi keaneka-ragaman haya-ti laut	Bertambahnya ahli di bidang kompetensi keanekara-gaman hayati laut Indonesia di bidang tak-sonomi kela-utan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	LIPI	Kemenkeu, KKP, Kemen-LHK, BPPT, Perguruan Tinggi	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
3.	Peningkatan Gizi Masyarakat Kelautan	Peningkatan konsumsi ikan rata-rata per kapita	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat kelautan (pelaku utama perikanan)	Konsumsi ikan masyarakat mencapai 54,49 kg per kapita per tahun pada tahun 2019	43,88 kg per kapita per tahun	47,12 kg per kapita per tahun	50,65 kg per kapita per tahun	54,49 kg per kapita per tahun	KKP	Kemenkes, Kementan, Kemenperin, Kemendag	APBN
		Akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan	Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan	Festival Perikanan Nusantara dan Lomba Aneka Masakan pada 34 Provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	KKP	Kemenkes, Kemenperin, Kemendag	APBN
			Sentra kuliner hasil perikanan yang disediakan dan dikelola	5 sentra kuliner perikanan	5	5	5	5	KKP	Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, BPOM	APBN
4.	Peningkatan Pelindungan Ketenagakerjaan	Peningkatan jaminan sosial (jamsos) tenaga kerja	Meningkatnya program pelindungan jamsos bagi pekerja	Target untuk jamsos pekerja semua sektor	22 juta	25 juta	29 juta	33,5 juta	Kemnaker	Kementerian Sosial (Kemensos), Kemenkes, BPJS Ketenagakerjaan	APBN
		pelayanan perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang efektif dan	terlaksananya pelayanan yang transparan bagi tenaga kerja asing	120 lokasi	30	30	30	30	Kemnaker		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		efisien de- ngan fasilitas sistem <i>online</i>									
		Peningkatan penerapan syarat-syarat kerja dan prinsip- prinsip nondiskrimi- nasi	Meningkatnya perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan (PP)	25,89% pada tahun 2019 (kumulatif)	22,60%	23,61%	24,72%	25,89%	Kemnaker		APBN
			Meningkatnya perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	6,57% di tahun 2019 (kumulatif)	6,12%	6,26%	6,41%	6,57%	Kemnaker		APBN
		Penarikan Pekerja Anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)	Meningkatnya fasilitasi miti- gasi dampak pelanggaran norma ketena- gakerjaan	18 ribu di tahun 2019 (kumulatif)	16,5 ribu	17 ribu	17,5 ribu	18 ribu	Kementerian Pemberdaya- an Perempu- an dan Per- lindungan Anak (Kemen- PPPA)	Kemensos, Kemnaker, Kemen- dikbud, Pusat Pela- yanan Terpa- du Pember- dayaan Perempuan dan Anak (P-2-TP-2-A)	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Penerapan norma peng- hapusan dis- kriminasi ter- hadap tenaga kerja perem- puan	Meningkatnya para pelaku hubungan in- dustrial yang mendapatkan pemahaman tentang kese- taraan di tempat kerja	perusahaan- perusahaan yang mempe- kerjakan tena- ga kerja pe- rempuan	200	220	240	260	Kemnaker	Kemen- PPPA, KKP, P-2-TP-2-A, Pemda	APBN, APBD
		Penerapan norma Kese- lamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah per- usahaan yang menerapkan norma K3 dan Sistem Mana- jemen Kesela- matan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Perusahaan/ <i>stakeholders</i>	2010	2230	2460	2680	Kemnaker	Kemenperin, Kemenkes, KKP, Dewan Keselamat- an dan Kesehatan Kerja Nasional (DK-3-N), Pemda	APBN, APBD
		Penyusunan standar Kese- lamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)	Meningkatnya kualitas pengembangan dan pengujian K-3	Perusahaan/ <i>stakeholders</i>	440	460	480	500	Kemnaker	Kemenkes, Kemenperin, KKP, DK-3-N, Pemda	APBN, APBD
		Pengelolaan kenelayanan	Nelayan yang terlindungi dengan asu- ransi	2,7 juta nela- yan yang ter- lindungi de- ngan asuransi	600.000	1.000.000	1.000.000	100.000	KKP	BUMN	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
5.	Peningkatan Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat Kelautan yang Diwujudkan melalui Semua Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Sinkronisasi dan penyeselarasan kurikulum kemaritiman sesuai dengan kebutuhan DU/DI	Kurikulum kemaritiman sesuai dengan kebutuhan DU/DI	1	1	1	1	Kemendikbud	Kemenhub, KKP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Pemda	APBN, APBD, investasi
			Ketersediaan SMK kelautan/maritim yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing	Berdirinya SMK Maritim/ Kelautan	140	140	140	140	Kemendikbud	Kemenhub, KKP, Pemda	APBN, APBD
6.	Penyusunan Kurikulum Pendidikan yang Berorientasi Kelautan		Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 di SMK Kemaritiman dan terciptanya asesor guru SMK	Terbentuknya LSP P1 Kemaritiman	194	194	194	194	Kemendikbud	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Pemda	APBN, APBD
			Mengkaji regulasi terkait dengan pendidikan kemaritiman	Regulasi terkait pendidikan kemaritiman	1	1	1	1	Kemendikbud	Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pembinaan guru pendidikan menengah	Ketersediaan jumlah guru SMK maritim/kelautan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan	Alih fungsi/ keahlian ganda	124 orang	124 orang	-	-	Kemendikbud	KKP, Kemenhub, BNSP, Pemda, Swasta	APBN, APBD, Swasta, Joint Venture
			Tersedianya regulasi terkait cara pemenuhan guru produktif di SMK	Regulasi terkait Percepatan Pemenuhan Guru Produktif di SMK	1	1	1	1	Kemendikbud	Pemda, Swasta	APBN, APBD, Swasta, Joint Venture
7.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perguruan Tinggi Bidang Kelautan	Peningkatan program studi perguruan tinggi yang mampu mendukung pengembangan industri perikanan	Jumlah program studi perguruan tinggi yang terinventarisasi dan mampu mendukung pengembangan industri strategis perikanan	176 program studi berbasis perikanan (kumulatif)	161	166	171	176	Kemenristekdikti	KKP	APBN
		Revitalisasi politeknik yang mendukung perikanan	Jumlah politeknik yang direvitalisasi	10 Politeknik yang direvitalisasi (kumulatif)	3	6	8	10	Kemenristekdikti		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
8.	Penyediaan Insentif dan Bantuan Pendidikan Bidang Kelautan dan Riset Strategis Kelautan	Penyediaan beasiswa di bidang kelautan	Anak pelaku utama (nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah, pemasar)	Persentase anak pelaku perikanan yang mendapat bantuan beasiswa	44%	46%	48%	50%	KKP	Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenristekdikti	APBN
9.	Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Sekolah Pelayaran dan Perikanan	Pendidikan sumber daya manusia perhubungan laut	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	Jumlah Lulusan (orang)	2.835	2.910	2.880	2.850	Kemenhub		APBN
			Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya	Jumlah Lulusan (orang)	510	510	510	510	Kemenhub		APBN
			Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang	Jumlah Lulusan (orang)	2.075	2.075	1.985	1.985	Kemenhub		APBN
			Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar	Jumlah Lulusan (orang)	1.680	1.854	2.012	2.187	Kemenhub		APBN
			Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP-2-IP) Malahayati	Jumlah Lulusan (orang)	890	845	865	885	Kemenhub		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Balai Pendidik- an dan Pelatih- an Ilmu Pela- yaran (BP-2-IP) Tangerang	Jumlah Lulusan (orang)	1.020	1.020	1.200	1.380	Kemenhub		APBN
		Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terstandar	Jumlah Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terstandar (unit)	13 unit	14 unit	17 unit	17 unit	KKP	Kemendik- bud, Kemnaker	APBN
			Balai Pendidik- an dan Pelatih- an Ilmu Pela- yaran (BP-2-IP) Barombong	Jumlah Lulusan (orang)	480	600	720	720	Kemenhub		APBN
			Balai Pendidik- an dan Pelatih- an Ilmu Pela- yaran (BP-2-IP) Sorong	Jumlah Lulusan (orang)	600	600	600	600	Kemenhub		APBN
			Balai Pendidik- an dan Pelatih- an Ilmu Pela- yaran (BP-2-IP) Padang Paria- man	Jumlah Lulusan (orang)	890	652	890	845	Kemenhub		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelajaran (BP-2-IP) Minahasa Selatan	Jumlah Lulusan (orang)	890	652	890	845	Kemenhub		APBN
10.	Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha bagi Sumber Masyarakat di Bidang Kelautan, Khususnya pada Sektor Perikanan, Energi dan Pariwisata Bahari	Peningkatan kapasitas pemandu wisata selam	Meningkatnya jumlah sumber daya manusia wisata selam yang berkompeten dan berdaya saing global	Jumlah daerah yang difasilitasi	-	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota	Kemenpar	Pemda	APBN, APBD

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO